

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asyhadie, Zaeni, Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan: Dalam Teori dan Praktik di Indonesia* Jakarta: Prenada Media Group, 2023.
- Bambang, Joni, *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Harahap, Arifuddin Muda. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Batu Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2019.
- J.Lexy, Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Kertonegoro, Sentanoe. *Hubungan Industrial di Indonesia: Perspektif Bipartit dan Tripartit dalam Era Globalisasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Khakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2018.
- Machmud, Syahrul, *Hukum Acara Khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nuradi, Edi Rohaedi. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Persepektif Perlindungan Pekerja Alih Daya*. Jakarta: PT.Mandala Nasional, 2021.
- Pujiastuti, Endah. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan edisi revisi*. Semarang: Semarang University Press, 2008.

- Rita Fiantika, Feny, Mohammad Wasil, serta Sri Jumiati. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Rusmini, Andin. *Hukum Ketenagakerjaan “Sebuah Pengantar serta Gambaran.”* Makassar: Yayasan Barcode, 2020.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Rulam, Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan edisi revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Triningsih, Anna. *Hukum Ketenagakerjaan: Kebijakan serta Perlindungan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Wibowo, Hendro Agung, *Membaca serta Memahami Aturan Perburuhan* Surakarta: CakraBooks Surakarta, 2005.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi No.PER-31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Bipartit
6. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 90 Tahun 2021, yang merupakan perubahan dari Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas serta Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga kerja Kota Cirebon.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023

D. Jurnal

Maria Veronica Ngadien Prawesti, serta Muhammad Rizal. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Antara Karyawan Dengan Perusahaan Kopi Cap Kijang Bogor.” *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi serta Kewirausahaan* 4, no. 1 (3 Januari 2024): 185–93.

<https://doi.org/10.55606/jimek.v4i1.2688>

Maswandi. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial.” *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 1 (2017): 36–42.

<http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>.

Novi Herawati, Rofah Setiawati, and Irma Cahyaningtyas Program Studi Magister Kenotariatan, “Perwujudan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

- Sebagai Cerminan Asas Keseimbangan,” *Journal Notarius* 14, no.1 (2021):432, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39103>.
- Putra, F. D. “Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan Harian Lepas oleh Perusahaan Karena Alasan Cuti Haid”. *Media Juris*,3, no.2 (2020), 133–160. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.20890>
- Suhartoyo. “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional.” *Administrative Law & Governance Journal*. 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336>
- Kusuma, Ahmad Jaya, Edith Ratna, Irawati Progam, serta Studi Magister Kenotariatan. “Kedudukan hukum pekerja PKWT yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.” *Notarius* 13, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30324>.
- Sonhaji. “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/ PDT.SUS-PHI/ 2016 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.” *Online Administrative Law & Governance Journal* 1 (2018): 26. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.128-148>
- Wijaya, Agus, Solechan, serta Suhartoyo. “Analisis Yuridis Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Diponegoro Law Journal* 11 (2022). : <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33437>
- Yuliasuti, Ari, serta Emi Syarif. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menggunakan Acte Van Dading.” *Jurnal Ketenagakerjaan* 16, no. 2 (31 Desember 2021). doi:10.47198/naker.v16i2.107.
- E. Internet**
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “Sejarah Kemenaker,” 2018, diakses 15 Januari 2025, <https://search.app/edRUqzyiyxe5WaF77>.

F. Wawancara

Firzal Daqiqil MA, S.H., *Wawancara*, Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, (Kota Cirebon : 30 Januari 2025)

Jaja Sujana, S.Ap., M.Si, *Wawancara*, Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, (Kota Cirebon : 30 Januari 2025)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman www.fh.undip.ac.id Pos-el fh@fjive.undip.ac.id

Nomor : 170/UN7.F1/AK/2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

13 JAN 2025

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No.123, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon,
Jawa Barat 45131

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Firdha Istisyfah Yulistiana
NIM : 11000121140659
Alamat : Jl. Ki Gede Mayung, Desa Buyut, Blok. Kemaen, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon
Nomor HP : 082118424933
Bidang minat : Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suryo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 5027
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 7691820
Laman www.fh.undip.ac.id Pos-el fh@live.undip.ac.id

Nomor : 330/UN7.F1/AK/1/2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

13 JAN 2025

Yth. Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon
Jl. Ks. Tubun No.57, Kejaksan, Kec. Kejaksan,
Kota Cirebon, Jawa Barat 45123

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Firdha Istisyah Yulistiana
NIM : 11000121140659
Alamat : Jl. Ki Gede Mayung, Desa Buyut, Blok. Kemaen, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon
Nomor HP : 082118424933
Bidang minat : Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002



PEMERINTAH KOTA CIREBON
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KS. Tubun No. 57, Cirebon 45123 Telepon (0231) 222796
Email kesbangpol@cirebonkota.go.id Website kesbangpol.cirebonkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR 108/2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Cirebon.

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Nomor 330/UN7.F1/AK/1/2025 tanggal 13 Januari 2025 Perihal Permohonan Studi Pendahuluan dan Penelitian.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara administratif yang bersangkutan dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian ~~/Survei / Riset / Observasi / Pengambilan data / Praktik Kerja Lapangan / Kuliah Kerja Nyata~~ dengan identitas:

Nama	: FIRDHA ISTISYFAH YULISTIANA
NIM/KTP	: 11000121140659
No. HP	: 0821 1842 4933
Judul Penelitian	: "Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon"
Penanggung Jawab Kegiatan	: Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
Waktu Kegiatan	: 30 Januari 2025 s/d 28 Februari 2025
Lokasi Kegiatan	: Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
Nama Peserta Kegiatan	: -



Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan kedatangan dengan menunjukan Surat Keterangan Penelitian ini kepada pejabat setempat yang dituju;
2. Sepanjang kegiatan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban;
3. Hasil kegiatan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain;
4. Setelah selesai kegiatan, melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
5. Surat Keterangan Penelitian dinyatakan tidak berlaku bila ternyata pemegangnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 3 Februari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA CIREBON,



Drs. BUNTORO TIRTO, A.P., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197408081993111001

Tembusan:

1. Yth. Pj Wali Kota Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.



PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 123, Cirebon 45132 Telepon (0231) 203622
Email disnaker@cirebonkota.go.id Website disnaker.cirebonkota.go.id

Cirebon, 27 Maret 2025

Nomor : 400.15.5.4/217 /Sekre/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Balasan Riset/Penelitian

Yth. Dekan Universitas Diponogoro
Fakultas Hukum
di
Semarang

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 330/UN7.F1/AK/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 Hal Permohonan Riset/Penelitian dan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon Nomor : 108/2025 tanggal 03 Februari 2025 Hal Surat Keterangan Penelitian, atas nama :

Nama : FIRDHA ISTISYFAH YULISTIANA
NIM : 11000121140659
Judul Penelitian : "Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon"
Waktu : 30 Januari 2025 s/d 28 Februari 2025
Pengikut : -

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan Izin Penelitian kepada yang bersangkutan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu kegiatan Dinas;
2. Hasil kegiatan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain;
3. Kegiatan tersebut tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan;
4. Setelah selesai kegiatan, melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon.

Demikian agar maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Cirebon
Sekretaris



Dis. TRI HELVIAN UTAMA, MM
NIP. 19670318 199403 1 010

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon